

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai hal yang baru dalam persoalan hukum suatu Negara karena kasus ini pertama kali muncul jauh sejak ribuan tahun lalu, baik itu di Negara berkembang seperti Indonesia maupun Negara maju sekalipun. Fenomena korupsi yang marak terjadi akhir-akhirini di Indonesia adalah anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun yang bekerja sebagai pengurus dan kader partai politik. Seperti kasus yang dialami ketua umum dari Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy atau sering disapa Romy ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Romy pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur senilai Rp. 300 juta yang Romy dapat kan dari dua orang pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Akan tetapi tidak hanya itu saja, pusran korupsi menimpa ketika kepemimpinan dipegang oleh Suyadharma Ali yang dicurigai melakukan transaksi Dana Haji sebesar Rp. 230 milyar yang mencurigakan. Sedang di Sumedang sendiri dalam kurun waktu 2014-2019 kader PPP yang terjangkit kasus korupsi bisa dikatakan tidak ada (Yanuaar, 2019).

Perihal dengan Partai Politik dan Korupsi, dewasa ini, keduanya dapat menimbulkan heterogenitas citra baik maupun buruk. Korupsi yang sejatinya merupakan penyakit lepra sosial menjadi salah satu dampak yang nyata bobroknya dari pelaksanaan sistem partai yang dianut, terlebih dalam hal fungsi-fungsi partai, dimana hal tersebut di jadikan alat atau formalitas semata, menjadikan output yang di hasilkan guna mencapai elektabilitas saja. Sehingga, partai politik saat ini hanya mementingkan dari segi elektabilitasnya saja ketimbang kualitas yang dihasilkan oleh partai itu sendiri. Hal tersebut meyakinkan bahwa semakin membuktikan bahwa adanya sebuah hubungan

kausalitas antara praktek korupsi dengan proses kepartaian. Semakin melemah pembinaan partai serta pengawasan terhadap kadernya, sehingga hal tersebut menjadikan semakin tingginya kerugian negara yang dihasilkan dari aktor-aktor korup yang dimana mereka berasal dari partai politik. Pada akhirnya, kerugian yang terjadi malah menambah negara semakin parah, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik akan mengakibatkan banyaknya penurunan. Sehingga stigma masyarakat akan hal tersebut dapat menimbulkan gejolaknya emosional dikalangan masyarakat yang dimana hal tersebut memperkuat alasan masyarakat menja diapatis (Yanuar, 2019).

Pada kesempatan ini penulis bertujuan akan melakukan penelitian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap elektabilitas partai politik. Fenomena yang terjadi pada saat ini di Negara Indonesia banyak dilakukan oleh anggota partai politik yang duduk dikursi pemerintahan, seperti halnya yang dialami ketua dari Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy. Hal tersebut yang dapat menimbulkan naiknya sensitivitas emosional juga menurunnya elektabilitas dari Partai Persatuan Pembagunan dari 3,6% menjadi 2,4% pertanggal 19-25 Maret 2019 menurut Survei Charta Politika. Kendati demikian, hal tersebut memperkuat alasan masyarakat Sumedang menjadi apatis dan ketertarikan pada PPP mengalami penurunan. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Kasus Korupsi terhadap Elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sumedang”.

Penelitian terkait dampak yang ditimbulkan korupsi terhadap elektabilitas partai politik ini sangatlah penting karena dapat menghasilkan bagaimana persepsi masyarakat terkait partai politik setelah para politisinya banyak yang terjerat kasus korupsi. Penelitian ini juga dapat menghasilkan keelektabilitan partai politik terutama Partai Persatuan Pembangunan setelah kadernya terjerat kasus korupsi.

Dalam penerapan politik terkait dari kasus korupsi yang menjerat ketua umum PPP, Romahurmuziy. PPP Sumedang berkoalisi dengan PAN menaawarkan produk baru yang berupa politik baru atau yang lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan dari itu, perlu diiklankan dan dipropagandakan. untuk

produk yang dimaksud atau ditawarkan harus dirumuskan dan dikemas dengan baik dan jelas. Jika itu tidak dapat dirampungkan akan tidak menarik untuk warga yang ditawarkannya. Pertentangan internal PPP perlu diatasi, sedapat mungkin sebelum dilakukan kampanye terbuka atas produk atau politik pada pilpup Sumedang 2018. Partai politik tidak jauh dengan yang namanya elektabilitas. Elektabilitas partai politik yang tinggi cenderung ditentukan oleh citra baik dari partai itu sendiri tetapi, bagaimana ketika ada kader partai politik tersandung kasus korupsi. Seperti halnya yang dialami Partai Persatuan Pembangunan ada kader nya yang tersandung kasus korupsi, akan tetapi tetap berhasil meraih suara yang cukup tinggi pada pemilu 2019. Pada pemilu 2014 silam PPP berhasil menempatkan 39 caleg dari 560 orang caleg yang berhasil melenggang kesenayan, akan tetapi elektabilitas partai ini menurun pada pemilu 2019 hal ini disebabkan kader dari partai yang berlambang kabah ini tersandung kasus korupsi. Penurunan elektabilitas yang lebih dari satu juta suara, pada 2014 lalu Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan sebesar 8,1 juta suara atau 6,53% dari suara sah nasional. Namun, pada pileg 2019 hanya 6,3 atau 4,52% suara yang didapat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jelaskan sehingga mendapatkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana elektabilitas PPP Sumedang pada Pemilu 2019 pasca kasus korupsi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong elektabilitas PPP Sumedang tetap meningkat pasca kasus korupsi?
3. Bagaimana strategi PPP DPC Sumedang dalam meningkatkan elektabilitasnya pada Pemilu 2019 pasca kasus korupsi?

C. Tujuan

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak Korupsi terhadap elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sumedang, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan elektabilitas PPP Sumedang pasca kasus Korupsi serta faktor apa saja yang mendorong elektabilitas PPP Sumedang tetap meningkat pasca kasus korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mendorong elektabilitas PPP Sumedang tetap meningkat pasca kasus korupsi.
3. Untuk mengetahuidan menggambarkan strategi PPP DPC Sumedang dalam meningkatkan elektabilitasnya pada Pemilu 2019 pasca kasus korupsi

D. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian: Manfaat itu diantaranya adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diarahkan untuk pengembangan ilmu politik dalam bidang kajian partai politik. Terutama kajian partai politik yang bersih dan berhasil mendapat dukungan dari masyarakat luas. Sedangkan kegunaan praktis diarahkan untuk menjadi rujukan bagi upaya perumusan dan penetapan kebijakan politik yang dapat menjaga partai politik dari segala praktik korupsi. Dari penelitian Kasus Korupsi terhadap elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sumedang pada pemilu 2019, kemudian penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini. dengan harapan penelitian ini dapat mengisi kekosongan kepustakaan tersebut. penulis juga meyakini bahwa kasus korupsi terhadap elektabilitas PPP di

Kabupaten Sumedang merupakan fenomena dan merupakan persoalan yang masih perlu dibicarakan.

